

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah di yakini masih merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut.

Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Pihak ketiga tersebut adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha koperasi, swasta

nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia. Penyertaan modal daerah tersebut bertujuan untuk mendapatkan bagi hasil dari pihak ketiga berupa pembagian hasil keuntungan perusahaan. Pembagian hasil keuntungan tersebut akan diterima pemerintah daerah sebagai hasil pengelola kekayaan yang dipisahkan yang merupakan salah satu komponen di dalam pendapatan asli daerah. Dengan adanya bagi hasil keuntungan perusahaan yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah daerah memerlukan langkah dan upaya menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah oleh pemerintah daerah

bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Potensi sumber daya alam wilayah kabupaten Sumba Tengah yang cukup berlimpah dari berbagai sektor akan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, hal itu bisa terjadi salah satunya dengan perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang baik dengan data statistik pendapatan daerah yang akurat guna bahan evaluasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Henrikus Triyanto (2017) dengan judul “ Pengaruh penyertaan modal daerah, produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk usia produktif terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten / kota di Kalimantan Barat” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyertaan modal daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan jumlah penduduk usia produktif mempunyai pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah namun tidak signifikan. Maka dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat tidak setiap tahunnya menyertakan modal dalam bentuk investasi dalam kegiatan ke pemerintahannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul” **PENGARUH PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PRODUK DOMESTIK RAGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2010-2019**”

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Pengaruh penyertaan modal daerah dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sumba Tengah 2010-2019”.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

1. Bagaimana pengaruh Penyertaan Modal Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli daerah?

## **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penyertaan modal daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh Produk Domestik Rergional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik dan untuk salah satu

syarat mengikuti ujian skripsi dan oral komprehensif sarjana lengkap pada fakultas ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- b) Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan baik.
- c) Bagi program studi, diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik